

Rapor Merah Cellica-Jimmy

dari halaman 1

Komersialisasi Sampah

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang beberapa kali diwawancara oleh KBE, justru membanggakan naiknya retribusi sampah, di saat yang sama mengakui kewalahan—jika tak ingin disebut angkat tangan—dengan persoalan banyaknya sampah yang berserakan, baik itu di pinggir ruas jalan perkotaan, sampai ruang kosong di pesisir.

Persoalan sampah menjadi pekerjaan serius yang dihadapi Pemkab Karawang. Tak kurang dari 900 ton sampah sampah diproduksi per hari. Namun hanya sekitar 400 ton sampah yang bisa terangkut ke TPAS Jalupang oleh 63 armada pengangkut sampah yang dimiliki DLHK Karawang. 500 ton sampah menjadi momok yang terus menumpuk di TPAS liar per harinya.

Kondisi TPAS Jalupang pun sudah sangat overload.

Dalam tiga tahun terakhir, DLHK Karawang mengambil inisiatif menggandeng pihak swasta dalam mengelola urusan sampah. Hal ini diklaim lantaran terbatasnya pegawai plus anggaran yang terbatas. Saat ini program yang sudah berjalan diswastanisasi adalah pengelolaan armada angkut sampah yang juga sekaligus dibebani retribusi sampah. Kepala DLHK Karawang mengklaim, program ini sukses menikkan retribusi sampah melebihi target dalam dua tahun terakhir.

“Alhamdulillah. Dari 4 UPTD yang ada dan bekerja sama dengan pihak swasta, kini retribusi naik. Bahkan kata Pak Sekda, LH yang paling baik,” tutur Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan saat diwawancara KBE beberapa waktu lalu.

Selain itu, saat ini DLHK Karawang pun sedang ge-

tol berjuang menggolkan swastanisasi TPAS Jalupang. Saat ini PT Organic Bali menjadi satu-satunya pihak swasta yang paling serius ingin mengelola TPAS Jalupang yang sudah dipenuhi 106 ribu ton sampah itu. Sampah di TPAS Jalupang akan diolah kembali menjadi briket sebagai pengganti batu bara melalui teknologi refuse-derived fuel (RDF).

“Saat ini sedang menunggu evaluasi FS dari Bappenas. Dari Bappenas menimbang, apa benar nih si pihak swasta mau serius dan memang memiliki uang,” kata dia.

Aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang, Feri Rizwan menilai apa yang sudah dibanggakan oleh DLHK Karawang soal retribusi sampah naik, tapi kewalahan mengurus sampah adalah ambivalensi kebijakan yang diambil oleh Pemkab Karawang.

Menurutnya yang paling

utama adalah bagaimana caranya sampai yang tak terangkut berkurang. Bukan bagaimana caranya retribusi naik yang didahulukan.

“Artinya kan indikasinya, yang pertama bisnis dulu alias retribusi, itu urusan cuan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat soal sampah yang tak terangkut nomor belakangan. Kan secara tidak langsung begitu,” kata Feri.

Ia berharap, cara pandang kerja DLHK Karawang ke depan harusnya dibalik, yang pertama membanggakan capaian kerja mengurangi angka sampah yang tak terangkut, baru kemudian bicara berapa banyak retribusi yang diperoleh.

“Jangan dibalik-balik. Sekilas tentu cara yang bagus membanggakan hasil kerja, tapi jika kita telaah apa fungsi utama pemerintah dalam hal ini DLHK, justru di nomor dua kan. Jadi ngaco kan bukan bagus,” sindirnya. (mhs)